

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini masalah kemiskinan kerap menjadi perhatian oleh semua negara khususnya negara berkembang seperti di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik penduduk miskin yaitu penduduk yang mempunyai rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Kemiskinan dapat terjadi karena beberapa penyebab seperti rendahnya tingkat pendapatan yang diperoleh masyarakat. Selain itu kemiskinan disebabkan akibat rendahnya kualitas hidup manusia, ketidaksesuaian upah minimum yang diperoleh, serta setiap tahun terus bertambahnya jumlah penduduk yang miskin. Untuk menekan angka kemiskinan wajib dilaksanakan dengan cara komprehensif serta terpadu serta mencakup seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat (Nasir et al., 2008).

Kemiskinan merupakan fenomena sosial-ekonomi yang tidak hanya melintas batas agama , tetapi juga suku dan kebangsaan. Karakteristik utamanya adalah rendahnya dan terbatasnya aksesibilitas dalam pemenuhan kebutuhan baik pangan, sandang, papan maupun pendidikan, kesehatan, dan hiburan. Fenomena tersebut tentu diperlukan penanganan dengan pendekatan yang sesuai karakteristiknya agar angka kemiskinan yang begitu tinggi menjadi berkurang. Karakteristik kemiskinan dapat dilihat dari beberapa dimensi, yaitu kultural, struktural, dan sistemik . Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang muncul karena faktor budaya. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang terjadi karena adanya perbedaan struktur sosial, sedangkan kemiskinan sistemik adalah Kemiskinan sistemik adalah kemiskinan yang terjadi karena sekelompok

yang kaya dan hidup dalam kemewahan berada dalam kebudayaannya sendiri serta berusaha menguasai dan mengontrol berbagai segi kehidupan baik dari sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem sosial yang berlaku di masyarakat (Sanadjihitu Sangadji, 2015).

Terdapat berbagai faktor penyebab kemiskinan di suatu daerah yaitu yang pertama, kapasitas yang dimiliki setiap individu maupun kelompok masyarakat menunjukkan ketidaksamaan yang tinggi sehingga mengakibatkan ketimpangan di dalam distribusi pendapatan. Masyarakat yang tergolong miskin cenderung memiliki kualitas sumber daya rendah. Selanjutnya, jika sumber daya manusia yang dimiliki berkualitas rendah sehingga akan cenderung melakukan kegiatan produksi yang rendah pula sehingga upah yang didapatpun minim. Kualitas sumber daya di dalam suatu masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, keturunan, sosial, kondisi lingkungan dan pendidikan. Yang terakhir, akses modal yang tidak tersebar secara merata (Fairizta et al., 2020)

Secara nasional, angka kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan. Menurut Badan Pusat Statistik di tahun 2021 tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 10.4% atau sebanyak 27,4 juta masyarakat Indonesia bersatatus miskin. Angka tersebut turun dibanding dengan tahun sebelumnya, akan tetapi angka tersebut tergolong masih tinggi. Penurunan tingkat kemiskinan tersebut tak bisa dilepaskan dari usaha pemerintah dalam menangani kemiskinan dengan beragam program pro rakyat sehingga memberi pengaruh positif untuk penambahan kemampuan masyarakat (Suryandari, 2017).

Kemiskinan juga menyebar ke setiap daerah di Indonesia. Dapat diketahui di Indonesia pembangunan ekonomi cenderung berpusat di Pulau Jawa dengan sumbangan pada pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 57,89%, namun faktanya masalah kemiskinan berpusat di Pulau Jawa. Terdapat 9,03% pada September 2022, di mana persentase penduduk miskin di perkotaan sejumlah 7,65%, serta di desa sejumlah 11,94%. Berikut tabel perbandingan tingkat kemiskinan di Pulau Jawa :

Tabel 1.1 Perbandingan Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa

Provinsi	2017	2018	2019	2020	2021
DKI	3,77	3,57	3,47	4,53	4,72
Jawa Barat	8,71	7,4	6,91	7,88	8,40
Banten	5,45	5,24	5,09	5,92	6,40
Jawa Tengah	13,01	11,32	10,80	11,41	11,79
DIY	13,02	12,13	11,70	12,28	12,80
Jawa Timur	11,77	10,98	10,37	11,09	11,40

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari tabel tersebut Provinsi DIY menepati posisi pertama dengan tingkat kemiskinan paling tinggi di Pulau Jawa. Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami fluktuasi saat tahun 2015 sejumlah 14,91%. Pada tahun 2016 hingga 2019 terjadi penurunan secara terus menerus. Namun pada tahun 2021 kembali meningkat sebanyak 12,80% . Hal tersebut berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara nasional. Selain itu, juga disebabkan karena penduduk DIY mempunyai rata-rata pengeluaran perkapita sebanyak Rp. 463.479,00 (Bappeda DIY, 2020). Selanjutnya diakibatkan karena bantuan yang diberikan pemerintah tidak akurat sehingga untuk menyerdiakan jaminan sosial belum tepat sasaran.

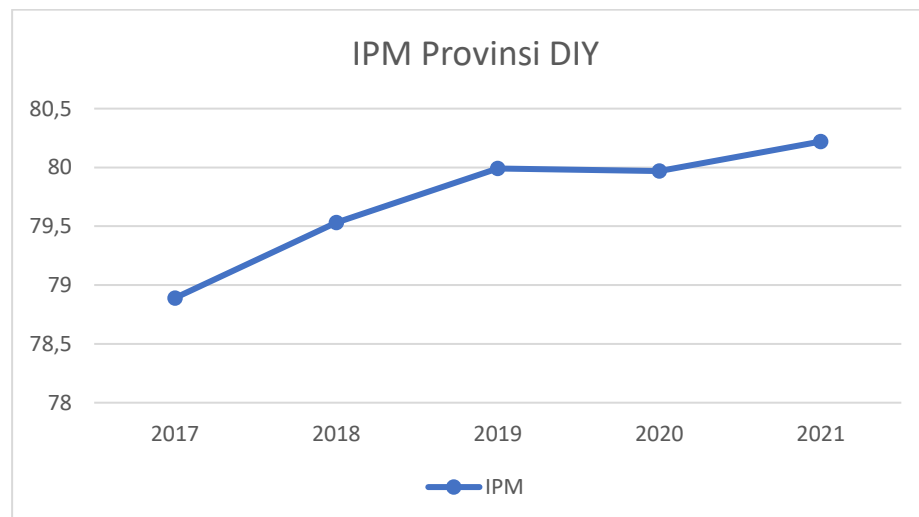
Provinsi yang terdapat di selatan Pulau Jawa memiliki luas wilayah yakni 3.133,15 km². Provinsi DIY tersusun dari satu kota serta empat kabupaten yakni kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul serta Sleman. Di antara kabupaten serta kota tersebut, Kulonprogo merupakan kabupaten yang mempunyai tingkat kemiskinan paling tinggi yakni sebesar 18,38 %. Sedangkan kota Yogyakarta merupakan kota dengan tingkat kemiskinan paling rendah sebesar 7,64% pada tahun 2021. DIY dikenal sebagai kota pendidikan maupun destinasi wisata, sehingga terasa janggal bila perputaran ekonomi di sana terbatas (Maulandy, 2023).

Selain itu faktor kultural atau kebudayaan menjadi salah satu penyebab kemiskinan di Provinsi DIY. Cara pandang masyarakat terhadap materi mempengaruhi hal itu. Orang Jawa khususnya DIY dikenal mengutamakan kebersamaan, keharmonisan, yang menurunkan nilai penting materi. Pola pemikiran masyarakat yang bisa membuat persoalan kemiskinan itu tidak harus ditakutkan. Masyarakat akan mengandalkan hubungan sosial untuk memecahkan masalahnya. Budaya *nrimo* (menerima) menjadi penyebab mengapa Yogyakarta menjadi provinsi yang warganya bahagia. Fenomena sosial semacam itu tidak bisa ditangkap oleh lembaga seperti BPS. Karena itu, akan sulit mencari penjelasan dari mereka, mengapa di satu sisi Yogyakarta berupah rendah, rasio gini tinggi dan miskin, tetapi di sisi lain bahagia dan berumur panjang (Medianti, 2023).

Selain itu faktor budaya seperti peraturan kerajaan sangat selektif terhadap pengaruh budaya barat dengan alasan menjaga kelestarian budaya.

Karena kebanyakan budaya barat menyebabkan adanya penyimpangan. Penyimpangan itu berupa hilangnya nilai kesederhanaan, merosotnya etos perjuangan, merebaknya budaya instan, bahkan menjadikan hedonisme sebagai budaya baru di tengah masyarakat D I Yogyakarta. Hal ini menyebabkan masyarakat di daerah DI.Yogyakarta hanya bisa berpangku tangan terhadap peraturan sultan dan ini yang menyebabkan kemiskinan terus meningkat tiap tahunnya (Pradipta, 2022)

Kualitas SDM adalah faktor lain yang bisa memperngaruhi kemiskinan, *Human Develoment Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran standar suatu pembangunan manusia yang diberlakukan Badan Perserikatan Bangsa. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu ukuran yang dimanfaatkan guna mengukur keberhasilan pembangunan (Muliza et al., 2017)



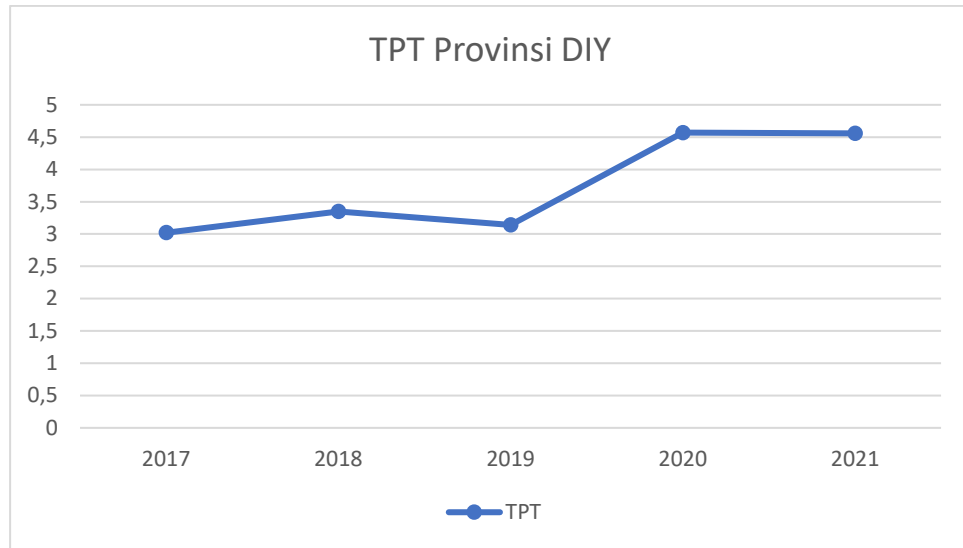
Gambar 1.1 Grafik IPM Provinsi DIY

Sumber : BPS Data Diolah

Dilihat dari grafik tersebut bisa diamati bahwasannya setiap tahun Angka IPM Provinsi DIY ditahun 2017 – 2021 terus meningkat. Menurut Publikasi

Badan Pusat Statistik pada tahun 2012 sampai 2021 menunjukkan bahwasannya tingkat Indeks Pembangunan Manusia di DIY menduduki posisi kedua dari semua provinsi di Indonesia. Dimana DKI Jakarta yang menduduki posisi pertama. Setiap tahunnya IPM di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terus bertambah hingga 80%, angka tersebut tergolong dalam IPM katagori sangat tinggi, namun kemiskinan di DIY tetap pada lima tahun terakhir tetap melonjak hingga 12.80% pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat belum sejalan dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan, namun pemerintah juga harus terus berupaya untuk mempertahankan perkembangan positif tersebut, sebagai bentuk pencapaian target pembangunan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sangan fluktuatif. Menurut BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah jumlah perbandingan diantara jumlah angkatan kerja dan jumlah penganggur yang dimanfaatkan guna memonitoring dan mengevaluasi indikator dalam pembangunan. TPT juga merupakan indikator yang bisa dimanfaatkan dalam mengukur tingkat suatu penawaran yang tidak terserap pasar tenaga kerja. Berikut ulasan tingkat pengangguran di Provinsi DIY :



Gambar 1.2 Grafik TPT Provinsi DIY

Sumber : BPS Data Diolah

Pada grafik tersebut menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi DIY saat periode 2019 mengalami penurunan sebesar 3,14%. Namun, TPT Yogyakarta saat tahun 2020 kembali lagi bertambah sebesar 4,57% dan saat tahun 2021 turun sejumlah 0,1% menjadi 4,56%. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) ketika pandemi Covid-19 merupakan penyebab peningkatan pengangguran terbuka di DIY. Berdasarkan daerah tempat tinggal masyarakat TPT daerah perkotaan 5,44%, sementara itu TPT di perdesaan sejumlah 2,21%. Hal tersebut bisa terjadi sebab wilayah perkotaan mempunyai sektor formal yang lebih banyak dibandingkan perdesaan. Dalam sektor informal lebih mudah dimasuki oleh para angkatan kerja dibanding sektor formal, sebab seperti yang diketahui di sektor formal lebih mengedepankan keahlian ataupun syarat-syarat khusus bagi angkatan tenaga kerja.

Selain itu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi D.I Yogyakarta mengalami penurunan. TPAK tahun 2018 tercatat sebesar

73,12%, di tahun 2019. TPAK menjadi 72,72% dan kembali turun di tahun 2020 menjadi 71,12%. Menurunnya TPAK di Provinsi D.I Yogyakarta ini menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Hal ini ini menyebabkan pengangguran yang menjadi salah satu penyebab tingginya provinsi DIY.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan faktor lain yang dapat memberikan pengaruh kepada kemiskinan. Apabila pertumbuhan penduduk semakin bertambah dan tidak diikuti dengan peningkatan sumber daya pangan dan kualitas penduduk maka dapat menambah kemiskinan. Terdapat jumlah penduduk yang semakin meningkat dapat mengganggu kegiatan pembangunan ekonomi. Beberapa manusia yang tinggal di sebuah kawasan dalam waktu tertentu disebut penduduk . Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat menurut Lincoln dapat mengakibatkan masalah serta gangguan, sebab pertumbuhan penduduk yaang tidak terkendali dapat menimbulkan penambahan jumlah tenaga kerja yang cepat, sementara itu di suatu daerah sangat terbatas untuk menghasilkan peluang tenaga kerja yang baru (Arsyad, 2004)

Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan jumlah penduduk di setiap tahunnya. Provinsi DIY terbentuk dari satu kota serta empat kabupaten yaitu kota Yogyakarta, kabupaten Gunungkidul, kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul serta Sleman. Provinsi DIY saat tahun 2020 memiliki 3.668.719 jiwa jumlah penduduk, dan tahun 2021 sebesar 3.712.896 jiwa. Di DIY diprediksi jumlah penduduk setiap tahunnya akan meningkat sehingga berpotensi meningkatkan kemiskinan. Oleh karena itu diperlukan

fokus terhadap program KB (Keluarga Berencana) Peningkatan jumlah penduduk tersebut harus dibarengi dengan adanya peningkatan lapangan pekerjaan untuk memperkecil tingkat kemiskinan karena tingkat kemiskinan di DIY sendiri sangat tinggi. Perluasan penyerapan tenaga kerja diperlukan untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk usia muda yang masuk ke pasar tenaga kerja sehingga dapat menekean kemiskinan.

Berdasarkan fenomena , bahwa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terjadi fenomena peningkatan kemiskinan, serta DIY termasuk Provinsi yang menduduki tingkat pertama kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa. Setiap tahunnya IPM di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terus bertambah hingga 80%, angka tersebut tergolong dalam IPM katagori sangat tinggi, namun kemiskinan di DIY tetap pada lima tahun terakhir tetap melonjak hingga 12.80%. Kenaikan tingkat pengangguran dan jumlah penduduk yang akan berpotensi meningkatkan jumlah penduduk miskin yang ada di DIY. Maka dari itu, dibutuhkan penelitian lebih lanjut tentang fakto-faktor yang bisa memberikan pengaruh kepada tingkat kemiskinan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi DIY, sehingga bisa dimanfaatkan untuk dasar kebijakan bagi semua kabupaten dan kota di Provinsi DIY sebagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti tertarik mengambil judul **“Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”**

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang yang sudah dibahas didapatkan rumusan masalah seperti berikut :

1. Apakah ada pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ?
2. Apakah ada pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ?
3. Apakah ada pengaruh Jumlah Penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai latar belakang serta rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh Jumlah Penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4 Ruang Lingkup

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan memanfaatkan metode Analisis Regresi Data Panel. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang didapat melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY.

Ruang lingkup penelitian ini yakni menganalisis Tingkat Kemiskinan di Provinsi DIY. Adapun variable dependen yang dimanfaatkan dalam penelitian ini yaitu Tingkat Kemiskinan, sedangkan untuk variable independen menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran, serta Jumlah Penduduk.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diinginkan bisa menjadi masukan bagi pemerintah pusat serta daerah dalam membuat kebijakan perencanaan pembangunan spesifik di bidang ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, hasil penelitian ini diinginkan menjadi salah satu kajian empiris yang bisa menambah wawasan.